Peranan Jaksa Selaku Aparat Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Kepabeanaan

Juan Vranjes Marbun¹, Jinner Sidauruk²

^{1,2} Universitas HKBP Nommensen

e-mail: juanvranjes.marbun@student.uhn.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan Negara Maritim, artinya wilayah daratan Indonesia lebih kecil daripada wilayah perairannya. Indonesia memiliki 1.922.570 kilometer persegi daratan dan 3.257.483 kilometer persegi lautan. Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, serta Palau. Timor Leste serta Australia. Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan yang dimana terdapat puluhan ribu pulau yang membentang di wilayah Indonesia. Dalam hal ini perlunya pengawasan dan penegakan hukum baik secara preventif ataupun kuratif menjadi hal utama dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Kepabeanaan adalah sebagai penjaga pintu gerbang negara dalam hal barang barang perdagangan baik secara Nasional ataupun Internasional. Ini melibatkan proses administrasi dan hukum yang mengatur dan memafisilitasi perdagangan internasional untuk melindungi kepentingan ekonomi, sosial dan budaya negara.

Kata Kunci : *Peranan Jaksa, Tindak Pidana Kepabeanaan*

Abstract

Indonesia is a maritime country, meaning that its land area is smaller than its water area. Indonesia has 1,922,570 square kilometers of land and 3,257,483 square kilometers of ocean. Indonesia borders Papua New Guinea, Singapore, Thailand, India, the Philippines, Vietnam, and Palau. Timor Leste and Australia. Indonesia is also referred to as an archipelago where there are tens of thousands of islands stretching across the territory of Indonesia. In this case, the need for supervision and law enforcement both preventively and curatively is the main thing in maintaining Indonesia's sovereignty. Customs is the guardian of the country's gateway in terms of trade goods both nationally and internationally. It involves administrative and legal processes that regulate and facilitate international trade to protect the country's economic, social and cultural interests.

Keywords: *The Role of Prosecutors, Customs Crimes*

PENDAHULUAN

Sebagai jaksa penuntut umum yang berwenang buat mengajukan tuntutan pidana terhadap para pelanggar, Kejaksaan merupakan komponen penting dari aparat penegak hukum Indonesia, termasuk tindak pidana kepabeanaan. Tindak pidana kepabeanaan, yang mencakup kegiatan ilegal seperti penyelundupan barang, pemalsuan dokumen kepabeanaan, dan penghindaran pembayaran bea masuk, merupakan salah satu tantangan besar bagi otoritas penegak hukum. Kejaksaan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa pelanggaran di bidang kepabeanaan ditangani dengan efektif dan efisien.

Saat ini, dunia perdagangan internasional berkembang dengan begitu cepat, baik dalam hal impor maupun ekspor. Tentu saja, mengingat hal ini, sistem serta prosedur kepabeanaan yang lebih efektif serta efisien diperlukan, serta kemampuan untuk meningkatkan aliran dokumen serta komoditas. Persoalan birokrasi bidang kepabeanaan yang kompleks menunjukkan adanya masalah birokrasi. Hal itu, tidak diragukan lagi terkait erat dengan pentingnya penerapan beragam kebijakan ekonomi yang sedang berlangsung oleh Pemerintah, khususnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara.

Tindak pidana kepabeanaan adalah tipe kejahatan yang termasuk dalam kategori *economic crimes*. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa penyelundupan merupakan kejahatan yang

mengurangi pendapatan negara sehingga dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Kepabeanan mulai dikenal pada tahun 1995 melalui “Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006, Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.” Selain lokasi-lokasi tertentu di dalam Zona Ekonomi Eksklusif serta landasan yang berdekatan di mana Hukum berlaku, daerah pabean itu sendiri meliputi wilayah daratan, lautan, serta area udara di atasnya.

Secara terminologi kepabeanaan dikenal dengan istilah penyelundupan. Pada awalnya istilah penyelundupan tidak diartikan dalam hukum pidana, melainkan hanya berdasarkan hukum kebiasaan di negara-negara *common law*. Dalam perkembangannya yang dikatakan sebagai penyelundupan adalah perbuatan mengimpor atau mengekspor produk yang dilarang tanpa melunasi bea masuk yang berlaku. Penipuan yang mengambil ke suatu negara, atau keluar dari negara itu, barang dagangan yang dilarang secara hukum. Sementara itu penyelundup diartikan sebagai “a person who, though No. doubt highly blamable for violating the laws of his country, is frequently incapable of violating those of natural justice and would have been, in every respect, an excellent citizen had not the law of his country made that a crime which nature never meant to be so.” (Thauck, 2007). Sederhananya penyelundup itu merupakan individu yang memasukkan barang di sebuah negara dengan cara melawan atau melanggar hukum.

Secara etimologis, penyelundupan berasal dari bahasa asing (Inggris : *smuggle* serta Belanda ; *smokkle*), yang berarti impor, ekspor, mengirimkan produk yang melanggar hukum dan peraturan yang relevan ataupun gagal menyelesaikan prosedur kepabeanaan (*douneformaliteiten*) diuraikan dalam undang-undang serta peraturan. *Douneformaliteiten* merupakan prosedur kepabeanaan yang harus dipenuhi saat mengimpor atau mengekspor, meliputi perdagangan atau transportasi (Lopa, 1984).

Kejaksanaan Agung harus mengambil peran yang lebih aktif dalam mempertahankan supremasi hukum, menjaga kemaslahatan umum, membela semua hak asasi manusia, dan tugas-tugas lainnya sebagai suatu lembaga penegak hukum. Ditekankan bahwasannya kekuasaan negara digunakan secara otonom oleh lembaga pemerintah ini, yang bertanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus.

Berlandaskan latar belakangnya, sehingga peneliti merumuskan masalah yang lebih berfokus pada permasalahan kepabeanaan dan peran kejaksanaan dalam tindak pidana kepabeanaan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kepabeanaan dan mengetahui kendala Jaksa selaku aparat penegak hukum dalam tindak pidana kepabeanaan.

METODE

Ditinjau dari permasalahan diatas maka penelitian berikut menerapkan metoda penelitian hukum yuridis normatif. Metode berikut dilakukan dengan mempelajari, menganalisa, ataupun menafsirkan standar hukum yang ditemukan pada UU mengenai permasalahan hukum yang dibahas. Karena penelitian ini mengkaji pengaturan mengenai peran kejaksanaan selaku aparat penegak hukum dalam tindak pidana kepabeanaan, jenis penelitian ini akan menekankan pada analisis penerapan standar hukum positif ataupun undang-undang (Ibrahim, 2006).

Penelitian ini menggunakan hukum normatif guna mengetahui bentuk implemntasi dari kebijakan perundang-undangan yang mengelola terkait tindak pidana kepabeanaan serta peran kejaksanaan selaku aparat penegak hukum dalam pelanggaran yang melibatkan bea cukai

Berlandaskan Soerjono Soekanto yang maksud dari kajian hukum normatif ialah studi yang di mana bermula dari karakteristik serta cakupan dalam disiplin hukum, yang dipahami sebagai suatu sistem pemikiran (Salam, 2020).

Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan serta diberikan oleh pihak-pihak selain lembaga yang sedang diselidiki (Nursyafitri, 2020). Baik bahan hukum primer maupun tersier menyediakan data sekunder untuk penelitian ini. Ketiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku, termasuk kamus, serta beragam sumber tambahan, antara lain : artikel, majalah ilmiah, surat kabar, data/sumber yang tidak dipublikasikan, sumber

daring, serta materi lain yang berkaitan dengan tema penelitian, serta undang-undang yang mendasar dan peraturan yang berkaitan dengan hak anak buat bermain serta ruang terbuka hijau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Jaksa Selaku Aparat Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Kepabeanaan

Pada penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanaan, peranan jaksa merupakan hal penting yang dimana jaksa selaku penuntut umum di pengadilan. Pasal 1 ayat (6) a menyatakan "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan yang pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Penuntutan adalah Ketika jaksa penuntut umum mengajukan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berhak mengadilinya serta dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang ini, mereka meminta hakim untuk memeriksa serta memutus perkara tersebut dalam sidang pengadilan. Dengan demikian peranan jaksa merupakan hal yang urgensi selain daripada melaksanakan tuntutan juga sebagai pelaksana putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Tugas serta wewenang jaksa dikelola pada UU No 11 Tahun 2021 Mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30 UU No 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan :

"Melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik."

Pada Tindak Pidana Kepabeanaan tugas Jaksa sebagai penuntut umum guna melakukan penuntutan perlu adanya koordinasi dengan Instansi lainnya seperti Kepolisian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berikut tahapan penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanaan:

1. Penyelidikan

Investigasi ialah rangkaian prosedur yang digunakan untuk mencari serta mengidentifikasi suatu keadaan atau kejadian yang berkaitan dengan kejahatan serta tindak pidana ataupun yang diduga sebagai tindak pidana (Harahap, 2017). Penyelidikan dilaksanakan oleh Petugas Direktorat Jenderal Bea serta Cukai untuk mengumpulkan bukti awal tentang adanya dugaan tindak pidana kepabeanaan. Adanya penyelidikan didasari hasil patroli antara Instansi Kepolisian dengan Bea dan Cukai. Di tahap ini pemeriksaan fisik terhadap barang barang yang dicurigai akan dilakukan dan jika ditemukan maka akan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam tahap penyelidikan.

2. Penyidikan

Penyidikan ialah rangkaian langkah yang diambil oleh penyidik guna mencari serta menghimpun bukti-bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi (Moeljatno, 2002). Setelah bukti cukup sebagaimana dalam pasal 184 UU No 08 Tahun 1981 Mengenai Kitab UU Hukum Acara Pidana maka tahap kemudian Direktorat Jenderal Bea serta Cukai melaksanakan penyidikan guna mengumpulkan bukti tambahan dan mengidentifikasi pelaku tindak pidana. Perihal berikut pemanggilan saksi akan dilakukan guna mendukung bukti, mengumpulkan dokumen serta analisa barang bukti. Setelah bukti tambahan lengkap maka akan berkas akan dilakukan yang memuat keterangan saksi, dokumen dan lainnya. Setelah berkas lengkap maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan menyerahkan segala berkas dan tersangka kepada Kejaksaan Negeri untuk dilakukan penuntutan. Penyerahan akan dilaksanakan 2 Tahap.. Tahapan pertama yaitu penyerahan berkas perkara awal serta Tahapan kedua yaitu penyerahan Tersangka beserta Barang Bukti.

3. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan atau perbuatan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membawa sebuah kasus pidana ke Pengadilan untuk disidangkan serta dimintakan pemeriksaan dan putusan hakim (Moeljatno, 2002). Dalam hal penuntutan,

Jaksa akan Menyusun surat dakwaan dan membawa kasus ke pengadilan. Proses penuntutan yang dilakukan di ruang persidangan akan melibatkan pembuktian di hadapan hakim.

4. Persidangan

Pengadilan adalah tempat memeriksa, mengadili, memutus perkara. Pengadilan akan memeriksa semua bukti dan mendengarkan keterangan dari Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Terdakwa, Saksi serta lainnya. Hakim pada akhirnya akan menentukan apakah terdakwa bersalah ataupun tidak. Tahapan persidangan diawali dengan Pembacaan Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, Eksepsi, Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Eksepsi, Putusan Sela, Pembuktian, Tuntutan, Nota Pembelaan (Pledoi), Replik, Duplik, Putusan Hakim. Putusan yang ditetapkan oleh hakim dapat berupa denda, hukuman penjara dan lainnya yang telah diatur sejalan pada ketentuan aturan perundang-undangan.

Kejaksanaan dan Direktorat Jenderal Bea serta Cukai kerap melakukan Kerjasama saat melakukan penerangan hukum berupa sosialisasi kepada Masyarakat, pelajar mahasiswa, maupun lainnya mengenai peraturan kepabeanan dan urgensi daripada undang-undang kepabeanan. Ini adalah langkah pencegahan yang dimaksudkan untuk menghentikan kejahatan kepabeanan yang terjadi (Marsuki, 2021).

Kepabeanan selaku tindak pidana yang berpengaruh di bidang sosial, ekonomi, politik bahkan budaya memiliki tantangan yang harus dihadapi berikut diantaranya (Hamzah, 1985) :

1. Infrastruktur serta fasilitas yang kurang mencukupi dalam kaitannya dengan frekuensi kejahatan.
2. Memungkinkan adanya penyelesaian perkara secara non-litigasi maupun secara litigasi
3. Ketidaksiharasan dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan antar Lembaga penegak hukum
4. Hambatan dalam proses pembuktian kerap kali terjadi karena kesaksian ahli, catatan, serta sumber-sumber lain dari Direktorat Bea serta Cukai sulit didapatkan.
5. kurangnya visi dari pimpinan instansi dalam menugaskan personil untuk menduduki jabatan-jabatan penting. Individu yang melakukan kejahatan kepabeanan cenderung kaya raya, memiliki jaringan luas di seluruh dunia, sering bepergian ke luar negeri, memiliki rencana yang sukses, serta mendapat dukungan dari orang-orang yang berpengaruh (Marpaung, 1991).

Dengan demikian peran jaksa selaku aparat penegak hukum dalam tindak pidana kepabeanan bukan semata mata hanya pada tahap represif namun juga ada tahapan preventif yang dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana di kepabeanan.

Kendala Jaksa Selaku Aparat Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Kepabeanan

Berlandaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia Kendala merupakan penghalang yang menghambat, menghalangi, menghadang, ataupun membatasi suatu hal agar tercapai sesuai dengan target atau sasaran. Dalam Prakteknya, Jaksa selaku salah satu Lembaga aparat penegak hukum tentu mengalami kendala berbagai macam yang bisa menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana termasuk dalam tindak pidana kepabeanan. Pada tindak pidana umum, jaksa yang berwenang selaku penyidik pun tentu akan menemukan kendala-kendala yang dihadapi baik seperti pengumpulan alat bukti, pemanggilan saksi atau tersangka guna dimintai keterangan maupun lainnya.

Michael Barama mendefinisikan bahwa Tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang selain KUHP dikenal sebagai tindak pidana khusus serta memiliki ketentuan-ketentuan khusus dalam hukum formilnya (Barama, 2015). Hal yang menyebabkan adanya tindak pidana khusus ini disebabkan berbagai factor seperti Perkembangan Ekonomi dan Globalisasi, Kemajuan Teknologi, Kelemahan Regulasi dan Pengawasan, Kesenjangan Sosial dan Ekonomi, Penyalahgunaan Kekuasaan, Krisis Lingkungan, Sifat Dinamika Hukum dan lainnya. Salah satu jenis tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang selain KUHP adalah tindak pidana kepabeanan (KUHP).

Dalam penanganan tindak pidana kepebeanaan Jaksa hanya sebagai penuntut karena peran mereka telah diatur secara jelas dalam sistem peradilan pidana. Beberapa alasan lainnya adalah pembagian fungsi yang jelas, pemisahan berdasarkan kompetensi dan keahlian yang spesifik serta sebagai pendukung efisiensi dalam penegakan hukum. Sebagai penuntut umum, jaksa tentu mengalami kendala dalam menghadapi perkara tindak pidana kepebeanaan. Adapun yang menjadi Jaksa selaku aparat penegak hukum dalam tindak pidana kepebeanaan adalah :

1. Ruang lingkup tindak pidana kepebeanaan yaitu mencakup nasional bahkan internasional
2. Kurangnya koordinasi dengan Lembaga lainnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana kepebeanaan.
3. Dalam pembuatan berkas dakwaan jaksa selaku aparat penegak hukum sering mengalami kendala kurang lengkapnya berkas perkara yang diterima dari penyidik. Hal ini membuat kasus akan lama ditangani (Barama, 2015).

Jaksa selaku aparat penegak hukum tentu juga mengalami kendala dalam pelaksanaan tugasnya selaku aparat penegak hukum. Adapun yang menjadi kendala jaksa dalam penanganan tindak pidana kepebeanaan adalah :

1. Keterbatasan sumber daya seperti tenaga dan anggaran yang dimana menghambat kemampuan jaksa untuk melakukan penuntutan perkarannya tindak pidana kepebeanaan.
2. Koordinasi antar Lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Direktorat Bea dan Cukai, Kepolisian) kurang yang mengakibatkan kendala bagi jaksa dalam tindak pidana kepebeanaan (Amalina, 2024).
3. Keterbatasan kewenangan pengawasan Jaksa guna mengendalikan tindak pidana kepebeanaan yang dimana tindak pidana kepebeanaan sendiri melibatkan korporasi besar, kompleks dan jaringan yang luas (Saputra, 2021).
4. *Locus delictie terjadinya tindak pidana kepebeanaan lebih dari satu tempat.*
5. Berkas perkara yang belum selesai serta bolak-balik antara penyidik maupun jaksa penuntut umum.

SIMPULAN

Berlandaskan analisa yang dilaksanakan sehingga peran jaksa selaku aparat penegak hukum bukan lagi menjadi penyidik melainkan menjadi penuntut umum guna melaksanakan tuntutan pada pelaku yang diduga melaksanakan tindak pidana kepebeanaan sebagaimana yang telah dicantumkan di UU No 17 Tahun 2006 terkait Kepabeanaan yang sampai kini masih berlaku. Pada pelaksanaan tugasnya, Jaksa juga kerap menemukan beberapa kendala yang dimana dapat menghambat proses penegakan hukum dalam tindak pidana kepebeanaan. Namun jaksa selaku aparat penegak hukum juga menemukan cara untuk mengatasi hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Barama, M. (2015). *Tindak pidana khusus*.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Lopa, B. (1990). *Tindak pidana ekonomi: Pembahasan tindak pidana penyelundupan*.
- Marpaung, L. (1991). *Tindak pidana penyelundupan masalah dan pemecahan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno, S. H. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Nur Amalina. (2024). Kendala dan tantangan kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. *Media Indonesia*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com>.
- Putra, M. L., Raharjo, T., & Widowaty, Y. (2021). Penanggulangan tindak pidana oleh Bea dan Cukai Jakarta terhadap penyelundupan smartphone. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1).
- Tarihoran, E. R., & Anisah, A. N. (2024). Implementasi hak asasi manusia dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan*, 2(2).

- Thachuk, K. L. (Ed.). (2007). *Transnational threats: Smuggling and trafficking in arms, drugs, and human life*. Bloomsbury Publishing USA.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Yusuf, I. H. (n.d.). Peran kejaksaan dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan. *Lex Privatum*.4.3 (2006).